



Pengaruh Perubahan Sosial dan Modernisasi terhadap Pergeseran Perilaku Masyarakat di Era Globalisasi

Ina Fitriani^{1*}, Salsabila Aura Auliyah², Sabilla Efitha Dewi³, Delis Noni Herliani⁴,
Revan Tri Anggara⁵, Yesi Yohana Silaban⁶

¹⁻⁶Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Inafitriani942@gmail.com

Abstract. *This study examines the influence of social change and modernization on the shifting behavior of society in the era of globalization. Globalization, accelerated by advances in information and communication technology, has fundamentally transformed social interaction patterns, value systems, and ways of life, including in Indonesia. This research employed a library research method with a descriptive qualitative approach, in which secondary data were collected from scientific journals, books, proceedings, and relevant academic documents, and subsequently analyzed using content analysis techniques. The findings indicate that modernization drives society toward more rational, open, and adaptive ways of thinking, while simultaneously enhancing civic awareness and participation in digital public spaces. However, modernization also presents significant challenges, including rising individualism, the weakening of conventional social solidarity such as mutual cooperation (gotong royong), and increased public vulnerability to the spread of misinformation due to low levels of digital literacy. Social media literacy is proven to be a critical factor in shaping critical and responsible civic behavior. The study concludes that strengthening digital literacy and sustained civic education are essential to enable society to harness the benefits of globalization productively without losing cultural identity and local social values.*

Keywords: Civic; Digital; Globalization; Modernization; Social.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dampak perubahan sosial dan modernisasi terhadap perubahan sikap masyarakat dalam konteks globalisasi. Globalisasi yang didorong oleh kemajuan di bidang informasi dan komunikasi telah secara signifikan mempengaruhi cara interaksi sosial, nilai-nilai yang dianut, dan gaya hidup masyarakat, termasuk di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data sekunder diambil dari jurnal ilmiah, buku, prosiding, dan dokumen akademis yang relevan, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa modernisasi mendorong masyarakat untuk memiliki pola pikir yang lebih rasional, terbuka, dan mampu beradaptasi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ruang publik digital. Namun, modernisasi juga membawa tantangan seperti meningkatnya individualisme, berkurangnya solidaritas sosial tradisional seperti gotong royong, serta risiko masyarakat terpapar informasi tidak benar karena rendahnya kemampuan literasi digital. Literasi media sosial ternyata berperan penting dalam membentuk sikap kewarganegaraan yang kritis dan bertanggung jawab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan yang berkelanjutan agar masyarakat bisa memanfaatkan globalisasi dengan cara yang produktif tanpa mengorbankan identitas budaya dan nilai-nilai sosial setempat.

Kata Kunci: Digital; Globalisasi; Kewarganegaraan; Modernisasi; Sosial

1. LATAR BELAKANG

Kehidupan bermasyarakat pada dasarnya terbentuk dari sekumpulan individu yang dipersatukan oleh seperangkat aturan, tradisi, dan sistem nilai yang disepakati bersama. Ikatan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan dari bagaimana setiap anggota masyarakat menginternalisasi norma dan menjalankan perannya dalam kehidupan kolektif (Sari, 2023). Soekanto (2017) menegaskan bahwa dalam kajian sosiologi, ikatan normatif semacam ini tidak hanya membentuk struktur hubungan antara individu, tetapi juga menetapkan batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam interaksi sosial sehari-hari.

Guna menyederhanakan pemahaman atas beragamnya bentuk masyarakat di seluruh dunia, antropolog Elman Service mengusulkan pengelompokan masyarakat ke dalam empat tipe utama, yaitu kawanan, suku, kedaulatan, dan negara, yang dibedakan berdasarkan skala populasi, tingkat sentralisasi kekuasaan, dan lapisan stratifikasi sosialnya (Akmal, 2023). Kerangka tipologi ini memberikan pijakan konseptual untuk menelusuri bagaimana organisasi sosial manusia berkembang dari kelompok kecil berbasis kekerabatan menuju entitas negara yang kompleks. Namun demikian, batas antara tipe-tipe tersebut kini semakin kabur; di Indonesia misalnya, komunitas pedesaan yang secara historis bercirikan solidaritas kekeluargaan tradisional kini tengah bertransformasi akibat gelombang urbanisasi dan sekularisasi, bergeser dari ikatan mekanistik menuju hubungan yang lebih bersifat organik dan fungsional (Yulianti et al., 2025). Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat bukanlah entitas yang diam dan tetap, melainkan sistem yang senantiasa bergerak menyesuaikan diri dengan berbagai tekanan dari luar, mulai dari kebijakan pembangunan, arus migrasi, hingga gelombang transformasi teknologi.

Salah satu kekuatan pendorong terbesar di balik transformasi masyarakat kontemporer adalah globalisasi. Proses ini tidak sekadar menyangkut perluasan hubungan ekonomi antarnegara, tetapi juga mencakup persilangan budaya, pertukaran informasi, dan pergeseran orientasi nilai yang berlangsung secara masif dan lintas batas (Giddens, 2018). Akibatnya, tatanan sosial dan budaya yang selama ini menjadi pegangan masyarakat mulai mengalami guncangan, karena nilai-nilai yang datang dari luar kerap tidak selaras dengan kearifan lokal yang telah mengakar. Di Indonesia, gejala ini tampak nyata pada kalangan generasi muda yang semakin akrab dengan produk budaya asing, mulai dari tren busana, ekspresi bahasa, hingga cara bersosialisasi di ruang digital, sehingga terbentuklah identitas kultural yang bersifat hibrid, memadukan unsur lokal dan global sekaligus (Yulianti et al., 2025; Aryani et al., 2025). Kondisi ini tidak terlepas dari peran teknologi informasi yang telah merombak cara manusia berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial (Akbar et al., 2023), sekaligus melahirkan ekosistem masyarakat digital yang dicirikan oleh konektivitas tanpa batas dan dominasi platform daring dalam hampir setiap aspek kehidupan (Zain, 2026; Aryani et al., 2025). Perubahan sosial pada hakikatnya merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat manapun; seiring berjalannya waktu, struktur sosial, cara pandang, dan sistem norma akan terus mengalami pergeseran sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan manusia (Soekanto, 2017, dikutip oleh Zain, 2026).

Globalisasi mempersingkat jarak budaya antar negara dan mempercepat difusi nilai-nilai baru, sehingga perubahan sosial terjadi secara lebih masif dan simultan, menyentuh dimensi struktural, kultural, sekaligus interaksional dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2017). Di satu sisi, percepatan perubahan ini mendatangkan manfaat nyata berupa efisiensi yang lebih tinggi, kemudahan akses terhadap pengetahuan, serta terbukanya peluang sosial-ekonomi yang sebelumnya tidak terjangkau (Appadurai, 1996). Namun di sisi lain, ia juga memicu gesekan antara tata nilai lama dan orientasi hidup baru yang tidak selalu harmonis. Prinsip-prinsip moral yang selama ini menjadi acuan penilaian dalam masyarakat (Rokeach, 1973) dan pedoman yang mengatur tindak-tanduk individu dalam lingkungan sosialnya (Schwartz & Bilsky, 1987) kini harus dimaknai ulang dalam konteks budaya digital yang terus berkembang. Adopsi gaya hidup individualistik yang mengakar dari pengaruh budaya Barat, misalnya, semakin terasa di berbagai lapisan masyarakat Indonesia (Bellah et al., 2008). Temuan empiris dari sejumlah studi di Indonesia periode 2023–2024 mengungkap bahwa semakin tingginya ketergantungan pada teknologi digital justru berkaitan dengan melemahnya praktik sosial konvensional seperti gotong royong dan kepedulian terhadap sesama di lingkungan terdekat (Girsang & Telaumbanua, 2024). Meski demikian, teknologi pada saat yang sama juga membuka panggung baru bagi solidaritas berbasis daring, kampanye sosial lintas daerah, dan gerakan kolektif virtual yang memperluas, bukan menggantikan, bentuk-bentuk solidaritas fisik yang sudah ada (Aryani et al., 2025).

Meskipun kajian tentang perubahan sosial dan modernisasi telah berkembang cukup pesat, terdapat sejumlah kesenjangan yang belum sepenuhnya dijawab oleh penelitian sebelumnya. Studi-studi yang ada umumnya masih bersifat sektoral, mengkaji dampak teknologi secara terpisah dari dimensi normatif dan kultural, serta kurang memperhatikan kekhasan konteks lokal Indonesia dalam membaca ulang nilai dan norma di tengah arus globalisasi. Kajian sosiologi dan antropologi sosial terkini menekankan pentingnya penguatan literasi digital, etika berkomunikasi, serta internalisasi nilai sejak dini melalui institusi keluarga, sekolah, dan komunitas, agar masyarakat mampu memanfaatkan globalisasi secara produktif tanpa menanggalkan jati diri dan solidaritas sosial yang menjadi tulang punggung kehidupan bersama (Zain, 2026; Girsang & Telaumbanua, 2024). Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi dan modernisasi membentuk ulang nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat Indonesia, sekaligus merumuskan strategi adaptif yang memungkinkan masyarakat menavigasi perubahan tersebut tanpa kehilangan fondasi budaya.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teori merupakan komponen fundamental dalam setiap penelitian ilmiah karena berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memandu proses analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Tanpa landasan teori yang kokoh, sebuah penelitian akan kehilangan pijakan intelektualnya dan rentan menghasilkan simpulan yang bersifat spekulatif. Dalam penelitian yang mengkaji perubahan perilaku sosial masyarakat di era globalisasi dan modernisasi ini, diperlukan seperangkat teori yang tidak hanya mampu menjelaskan perilaku individu secara mikro, tetapi juga mampu menghubungkan perilaku tersebut dengan struktur sosial yang lebih luas pada tataran makro.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian ini, masyarakat bukanlah entitas yang statis melainkan sistem yang terus beradaptasi terhadap berbagai tekanan eksternal, termasuk arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan percepatan modernisasi yang membawa serta nilai-nilai baru yang tidak selalu selaras dengan norma dan tradisi yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya selalu bermuara pada perubahan cara individu berperilaku, berinteraksi, dan memaknai realitas sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, memahami dinamika perilaku sosial secara mendalam menjadi sangat relevan dan mendesak, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang tengah berada dalam pusaran transisi kultural yang kompleks.

Guna menjawab persoalan tersebut secara komprehensif, penelitian ini membangun landasan teoritis yang bersumber dari beberapa kerangka pemikiran yang saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Adapun teori-teori yang digunakan dalam kajian ini meliputi teori perubahan sosial, teori modernisasi, teori globalisasi, teori perilaku sosial, dan teori interaksi sosial. Kelima kerangka teori tersebut dipilih karena masing-masing memberikan sudut pandang analitik yang relevan dalam membedah fenomena pergeseran nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat Indonesia di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat. Sintesis dari keseluruhan kerangka teori ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang holistik, mendalam, dan secara akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial merujuk pada transformasi dalam struktur atau organisasi masyarakat. Fenomena ini merupakan hal umum yang terjadi di sepanjang waktu dalam berbagai sistem kehidupan sosial, dan hal ini terjadi sejalan dengan hakikat manusia yang selalu berkeinginan untuk beralih dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik.

Menurut William F. Ogburn, perubahan sosial mencakup elemen-elemen budaya, baik yang bersifat materi maupun non-materi, menekankan pentingnya pengaruh signifikan dari unsur-unsur budaya materi terhadap unsur-unsur non-materi. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai modifikasi yang terjadi pada struktur serta fungsi dalam suatu masyarakat. MacIver menyatakan bahwa perubahan sosial mencakup perubahan dalam hubungan sosial atau penyesuaian dalam keseimbangan hubungan sosial. JL. Gillin dan JP. Gillin mengemukakan bahwa perubahan sosial berbicara tentang variasi dalam cara hidup yang diterima di masyarakat, yang muncul sebagai akibat dari perubahan kondisi geografis, unsur budaya materi, komposisi populasi, ideologi, penyebaran, atau inovasi. Selo Soemardjan merumuskan bahwa perubahan sosial mencakup semua modifikasi yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat, memengaruhi sistem sosial secara keseluruhan, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara berbagai kelompok. Teori-teori perubahan sosial terbagi menjadi lima kategori, yaitu: Teori evolusi, teori revolusi, teori siklus.

Teori Evolusi

Perubahan sosial secara evolusi terjadi perlahan, memerlukan waktu yang panjang, dan proses perubahan ini diiringi oleh serangkaian perubahan kecil yang saling berkaitan. Evolusi ini berlangsung karena masyarakat berupaya menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kebutuhan serta kondisi baru yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dalam evolusi berlangsung secara alami tanpa adanya perencanaan atau niat dari pihak tertentu.

Teori Revolusi

Perubahan sosial secara revolusi adalah bentuk perubahan sosial yang paling mencolok, mencerminkan adanya perpecahan mendasar dalam sejarah. Revolusi menyebabkan perubahan yang sangat luas, menyentuh semua aspek dan dimensi masyarakat, termasuk bidang ekonomi, politik, budaya, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan karakter individu. Dalam semua area ini, perubahan bersifat radikal, mendalam, dan berpengaruh pada seluruh inti struktur serta fungsi sosial.

Teori Siklus

Perubahan sosial secara siklus, perubahan sosial berlangsung secara bertahap dan menghasilkan serangkaian kejadian. Proses ini tidak akan berhenti di tahap terakhir yang dianggap ideal, melainkan akan diperbaharui ke awal untuk maju ke tahap berikutnya. Oleh sebab itu, teori siklus sering digunakan untuk menggambarkan arah perubahan dalam peradaban masyarakat, dan dapat diartikan sebagai lingkaran. Di sisi lain, para pendukung teori ini percaya bahwa ada beberapa langkah yang harus diambil oleh masyarakat.

Namun, mereka berpendapat bahwa transisi masyarakat tidak berakhir dengan sebuah tahap yang sempurna, tetapi justru kembali ke tahap awal untuk melanjutkan transisi berikutnya.

Teori Modernisasi

Modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial yang mengarah pada kondisi yang lebih maju, rasional, dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Modernisasi tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan dalam pola pikir, nilai-nilai sosial, sistem ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya masyarakat. Melalui modernisasi, masyarakat yang sebelumnya bersifat tradisional secara bertahap mengalami transformasi menuju masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, inovasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Secara umum, modernisasi dipahami sebagai proses peralihan dari kehidupan yang sederhana dan tradisional menuju kehidupan yang lebih modern dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses ini biasanya ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan, berkembangnya sistem pendidikan, munculnya pola kerja yang lebih profesional, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang terarah dan direncanakan untuk mencapai kondisi masyarakat yang lebih maju. Modernisasi mencakup perubahan dalam cara berpikir, pola perilaku, serta berbagai lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, modernisasi tidak hanya mengubah aspek fisik kehidupan, tetapi juga mempengaruhi pola hubungan sosial dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Sementara itu, Wilbert E. Moore menjelaskan bahwa modernisasi adalah transformasi total dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang memiliki karakteristik ekonomi dan politik seperti yang berkembang di negara-negara maju. Modernisasi dipandang sebagai proses perubahan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Koentjaraningrat, modernisasi merupakan usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kehidupan yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam perspektif teori modernisasi, perubahan sosial terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, komunikasi, dan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk mengadopsi cara hidup yang lebih modern.

Oleh karena itu, modernisasi sering dikaitkan dengan munculnya masyarakat yang memiliki pola pikir rasional, menghargai prestasi, terbuka terhadap inovasi, dan mampu bersaing dalam lingkungan yang terus berkembang. Beberapa ciri utama modernisasi antara lain: 1) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia, 2) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga pola pikir menjadi lebih kritis dan rasional, 3) Terjadinya spesialisasi pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian individu.

Pada era globalisasi, modernisasi berlangsung semakin cepat karena didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Internet, media sosial, serta berbagai inovasi digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan berinteraksi tanpa batas geografis. Kondisi ini menyebabkan perubahan dalam gaya hidup, pola konsumsi, sistem kerja, serta cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi.

Di satu sisi, modernisasi memberikan berbagai manfaat seperti meningkatnya efisiensi kerja, kemudahan akses informasi, berkembangnya pendidikan, dan terbukanya peluang ekonomi baru. Namun, di sisi lain modernisasi juga dapat menimbulkan berbagai tantangan, seperti meningkatnya perilaku konsumtif, berkurangnya interaksi sosial secara langsung, serta terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya tradisional. Secara umum, modernisasi adalah proses perubahan sosial yang mengarah pada kemajuan masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir yang lebih rasional. Modernisasi tidak hanya mengubah aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga mempengaruhi nilai, perilaku, dan struktur sosial masyarakat. Dalam era globalisasi, modernisasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan sosial dan pergeseran perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Teori Globalisasi

Globalisasi adalah sebuah proses yang ditandai oleh meningkatnya hubungan, interaksi, dan saling ketergantungan antara individu, kelompok, masyarakat, serta negara di seluruh dunia. Proses ini muncul berkat kemajuan dalam teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang memungkinkan pertukaran informasi, barang, jasa, budaya, serta nilai sosial terjadi dengan lebih cepat dan luas tanpa terhalang oleh batas geografis suatu negara. Globalisasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat secara signifikan, mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pendidikan. Melalui globalisasi, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai negara, mengenal budaya baru, serta membangun hubungan dan kerja sama dengan komunitas internasional.

Oleh karena itu, banyak yang memahami globalisasi sebagai suatu proses yang menghubungkan dunia dan menciptakan saling ketergantungan di antara satu sama lain. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah peningkatan hubungan sosial di seluruh dunia yang mengaitkan berbagai peristiwa lokal dengan kejadian di lokasi lain, sehingga keduanya saling memengaruhi. Pandangan ini mengatakan bahwa globalisasi bukan hanya soal perkembangan teknologi atau ekonomi, tetapi juga melibatkan perubahan dalam pola interaksi sosial yang semakin luas dan kompleks. Kejadian yang terjadi di suatu daerah dapat segera diketahui dan berdampak pada masyarakat di daerah lain. Misalnya, tren budaya, gaya hidup, atau informasi dari negara lain dapat dengan mudah diakses dan diadopsi oleh masyarakat di Indonesia melalui internet dan media sosial.

Sedangkan menurut Roland Robertson, globalisasi dijelaskan sebagai proses penyempitan dunia dan peningkatan kesadaran bahwa dunia merupakan satu kesatuan yang terhubung. Definisi ini menekankan bahwa globalisasi tidak hanya mengurangi jarak fisik melalui kemajuan dalam transportasi dan komunikasi, tetapi juga membentuk kesadaran masyarakat bahwa mereka merupakan bagian dari komunitas global. Dengan meningkatnya kesadaran ini, berbagai isu internasional seperti perubahan iklim, perkembangan ekonomi global, konflik antarnegara, dan kemajuan teknologi menjadi perhatian bersama yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai negara.

Teori Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Interaksi sosial menjadi dasar utama terbentuknya hubungan sosial karena melalui proses inilah manusia saling memengaruhi, berkomunikasi, bekerja sama, serta membentuk pola perilaku dalam lingkungan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga interaksi sosial menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi sosial, seseorang dapat membangun hubungan, menyesuaikan diri dengan norma sosial, dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

Menurut Georg Simmel, interaksi sosial merupakan bentuk hubungan timbal balik antar individu yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Dalam pandangannya, masyarakat terbentuk karena adanya hubungan dan pengaruh timbal balik yang terus berlangsung antar anggota masyarakat. Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang melibatkan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi.

Sedangkan menurut Herbert Blumer melalui teori interaksionisme simbolik, interaksi sosial dipahami sebagai proses pertukaran makna melalui simbol-simbol yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. Simbol tersebut dapat berupa bahasa, gerakan tubuh, ekspresi wajah, maupun tindakan tertentu yang memiliki arti bagi orang lain. Dalam teori ini, manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka pahami dari suatu situasi sosial, dan makna tersebut terbentuk melalui proses interaksi dengan orang lain.

Dalam kehidupan masyarakat modern, interaksi sosial berkembang semakin luas seiring kemajuan teknologi komunikasi. Interaksi tidak hanya terjadi secara langsung melalui tatap muka, tetapi juga dapat berlangsung secara tidak langsung melalui media sosial, aplikasi komunikasi, maupun platform digital lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial menjadi elemen penting yang memengaruhi pola hubungan masyarakat, pembentukan identitas sosial, serta perubahan perilaku individu dalam lingkungan sosial.

Interaksi sosial dapat berlangsung apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu: a) Kontak sosial adalah hubungan awal yang terjadi antara individu atau kelompok sebelum berlangsungnya komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat langsung, seperti percakapan tatap muka, berjabat tangan, atau bekerja sama secara langsung, maupun tidak langsung melalui media komunikasi seperti telepon, pesan singkat, dan internet. Kontak sosial menjadi awal terjadinya hubungan sosial dalam masyarakat, b) Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, gagasan, informasi, maupun perasaan dari seseorang kepada orang lain sehingga tercipta pemahaman bersama. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal melalui bahasa maupun nonverbal melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan simbol tertentu. Tanpa komunikasi, interaksi sosial tidak dapat berjalan secara efektif karena tidak terjadi pertukaran makna antar individu.

Teori Perilaku Sosial

Perilaku sosial manusia merupakan salah satu objek kajian yang telah lama menjadi perhatian sentral dalam disiplin sosiologi maupun psikologi sosial. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masyarakat merupakan sistem yang terus beradaptasi terhadap berbagai tekanan eksternal, termasuk globalisasi, modernisasi, dan transformasi teknologi yang berlangsung secara masif. Dalam konteks perubahan sosial yang demikian cepat tersebut, pemahaman mendalam mengenai teori perilaku sosial menjadi sangat krusial, karena perubahan struktur dan nilai masyarakat pada akhirnya selalu bermuara pada perubahan cara individu berperilaku, berinteraksi, dan memaknai realitas sosial disekitarnya.

Oleh karena itu, kajian teori dalam penelitian ini dibangun di atas beberapa kerangka pemikiran besar yang saling melengkapi, yakni teori tindakan sosial Max Weber, teori fakta sosial Emile Durkheim, paradigma perilaku sosial behavioristik B.F. Skinner, serta perspektif psikologi sosial yang dikembangkan oleh para ilmuwan kontemporer. Dalam konteks perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi dan modernisasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemahaman tentang teori perilaku sosial menjadi semakin relevan dan mendesak. Berikut ini diuraikan beberapa pemikiran besar yang menjadi landasan dalam memahami perilaku sosial manusia.

Teori Tindakan Max Weber

Kerangka teori pertama yang menjadi pijakan dalam memahami perilaku sosial adalah teori tindakan sosial yang dikembangkan oleh Max Weber. Weber memandang perilaku sosial dari sudut pandang makna subjektif yang melekat pada setiap tindakan individu. Bagi Weber, suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut secara sadar diorientasikan kepada orang lain dan mengandung makna tertentu bagi pelakunya (Fikria & Moefad, 2024). Pandangan ini secara mendasar membedakan Weber dari pendekatan-pendekatan deterministik yang cenderung mengabaikan dimensi subjektif individu dan mereduksi perilaku manusia hanya sebagai produk dari kekuatan-kekuatan eksternal yang bekerja secara mekanis. Untuk memahami tipe-tipe perilaku yang ada dalam masyarakat, Weber mengklasifikasikan tindakan sosial ke dalam empat tipe utama yang mencerminkan gradasi antara rasionalitas dan non-rasionalitas dalam tindakan manusia. Pertama, tindakan tradisional, yakni tindakan yang dilakukan semata-mata karena kebiasaan yang telah mengakar secara turun-temurun dalam suatu komunitas tanpa melalui pertimbangan sadar maupun perencanaan yang matang. Tindakan ini sangat relevan untuk memahami mengapa sebagian masyarakat tetap mempertahankan tradisi dan praktik budaya lokal meskipun di tengah derasnya arus modernisasi yang menawarkan cara-cara hidup baru. Kedua, tindakan afektif, yaitu tindakan yang lebih didorong oleh perasaan, emosi, dan dorongan batin yang bersifat spontan tanpa melibatkan kalkulasi rasional terlebih dahulu. Tindakan jenis ini sering muncul dalam situasi yang melibatkan ikatan emosional yang kuat, seperti solidaritas komunitas, ekspresi kegembiraan kolektif, maupun reaksi terhadap ancaman terhadap identitas budaya kelompok. Ketiga, tindakan rasional instrumental, di mana individu bertindak berdasarkan pertimbangan sadar mengenai tujuan yang ingin dicapai sekaligus cara-cara paling efektif yang tersedia untuk mencapainya.

Tipe tindakan ini semakin mendominasi pola perilaku dalam masyarakat modern yang berorientasi pada efisiensi, produktivitas, dan kalkulasi untung-rugi. Keempat, tindakan rasional nilai, yaitu tindakan yang dilandasi oleh keyakinan terhadap nilai-nilai absolut tertentu, di mana tujuan dari tindakan itu sendiri sudah tertanam secara mendalam dalam sistem nilai yang diyakini individu, sehingga pelaksanaannya tidak selalu mempertimbangkan konsekuensi pragmatis yang akan diperoleh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi literatur merupakan penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber pustaka sebagai sumber data utama untuk memperoleh informasi, konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Menurut Fadli (2021), studi literatur dilakukan melalui proses pengumpulan, penelaahan, analisis, dan interpretasi berbagai referensi ilmiah guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh perubahan sosial dan modernisasi terhadap pergeseran perilaku masyarakat di era globalisasi berdasarkan berbagai kajian ilmiah yang telah dipublikasikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, prosiding, artikel penelitian, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan perubahan sosial, modernisasi, globalisasi, dan perilaku masyarakat. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema kajian, penyajian data secara deskriptif, serta penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai pengaruh perubahan sosial dan modernisasi terhadap pergeseran perilaku masyarakat di era globalisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Tradisi Lokal di Era Modern

Kajian terhadap dinamika partisipasi masyarakat dalam tradisi lokal mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas bukan sekadar ekspresi budaya, melainkan merupakan mekanisme sosial yang menentukan arah dan kualitas perubahan yang berlangsung di tengah masyarakat.

Dalam konteks perkembangan global yang ditandai oleh percepatan teknologi dan intensifikasi interaksi lintas budaya, tradisi lokal menghadapi tekanan transformasi yang semakin kompleks. Meskipun demikian, berbagai temuan penelitian justru menunjukkan bahwa tradisi tidak serta-merta tergerus oleh arus modernisasi. Sebaliknya, komunitas yang memiliki tingkat partisipasi budaya yang tinggi terbukti lebih mampu menegosiasikan identitasnya secara adaptif, menjadikan tradisi sebagai ruang hidup yang terus berevolusi tanpa kehilangan substansi nilainya. Ketahanan budaya lokal di hadapan modernisasi tidak dapat dilepaskan dari kapasitas komunitas dalam melakukan seleksi terhadap pengaruh eksternal. Miharja (2023) menemukan bahwa masyarakat adat tidak serta-merta menolak atau menerima modernitas secara keseluruhan, melainkan menempuh proses adaptasi yang bersifat selektif dan reflektif. Mekanisme ini memungkinkan komunitas untuk menyerap elemen-elemen baru yang dinilai kompatibel dengan sistem nilai yang dianut, sembari mempertahankan prinsip-prinsip budaya yang menjadi inti identitas kolektif mereka. Pola adaptasi yang sama ditemukan dalam penelitian Muhammad (2017) terhadap masyarakat Baduy, yang menunjukkan bahwa intensitas interaksi dengan dunia luar justru memperkuat kesadaran komunitas akan batas-batas budaya yang perlu dijaga. Dengan kata lain, keterbukaan terhadap perubahan tidak harus berujung pada hilangnya identitas, melainkan dapat menjadi pendorong bagi komunitas untuk lebih artikulatif dalam mendefinisikan dan mempertahankan jati dirinya. Proses adaptasi selektif tersebut sejalan dengan kerangka teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan, yang menegaskan bahwa transformasi Masyarakat pada dasarnya berlangsung melalui perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang pada gilirannya memengaruhi sistem nilai dan pola perilaku kolektif. Dalam perspektif ini, tradisi lokal berfungsi sebagai lembaga sosial yang tidak hanya mereproduksi nilai-nilai warisan, tetapi juga berperan dalam mengarahkan perubahan agar berlangsung secara terstruktur dan berkesinambungan. Tradisi dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai entitas statis yang berlawanan dengan perubahan, melainkan sebagai agen perubahan sosial yang bekerja dari dalam komunitas itu sendiri. Keberlangsungan tradisi lokal, dalam konteks ini, menjadi indikator sekaligus prasyarat bagi terciptanya perubahan sosial yang stabil, inklusif, dan memiliki akar kultural yang kuat.

Relevansi tradisi lokal sebagai instrumen kohesi sosial semakin menguat ketika dihadapkan pada tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Disatuisasi, kemudahan akses informasi dan interkoneksi antarbudaya membuka peluang bagi masyarakat untuk memperluas wawasan dan memperkenalkan nilai-nilai lokalnya kepada khalayak yang lebih luas.

Disisi lain, arus globalisasi berpotensi mengikis solidaritas komunitas apabila tidak diimbangi dengan upaya pelestarian yang terencana dan partisipatif. Pratama dan Pratama (2024) menjelaskan bahwa komunitas yang mempertahankan keterlibatan aktifnya dalam tradisi lokal menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dalam menjaga identitas kolektif di tengah tekanan homogenisasi budaya global. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam tradisi bukan sekadar aktivitas seremonial, melainkan merupakan praktik sosial yang secara aktif mereproduksi ikatan komunitas dan memperkuat fondasi kehidupan bersama. Basri dkk. (2024) menegaskan bahwa tradisi lokal mengandung nilai-nilai fundamental seperti gotongroyong, musyawarah, dan solidaritas yang menjadi modal sosial penting dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, termasuk meningkatnya kecenderungan individualisme dan melemahnya jalinan interaksi sosial di eradigital. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengikat komunitas dalam konteks ritual budaya, tetapi juga menjadi sumber referensi etis yang memandu perilaku kolektif dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi lokal dengan demikian menjalankan fungsi ganda: sebagai instrumen pelestarian warisan budaya sekaligus sebagai mekanisme penguatan kohesi sosial yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Potensi teknologi digital sebagai medium pelestarian budaya juga diakui oleh Panamuan dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa globalisasi, bila direspons secara strategis, justru dapat menjadi katalis bagi penguatan eksistensi budaya lokal dipanggung global. Tradisi yang sebelumnya hanya dikenal dalam lingkup geografis yang terbatas kini berpeluang untuk diperkenalkan kepada komunitas global melalui ruang-ruang virtual yang tidak mengenal batas wilayah. Fenomena ini menandai perluasan konsep partisipasi budaya: dari yang semula terbatas pada keterlibatan fisik dalam ruang seremonial, kini berkembang mencakup keterlibatan digital yang memungkinkan kontribusi dari mana saja dan kapan saja.

Bentuk-Bentuk Perilaku Kewarganegaraan terhadap Perubahan Sosial Masyarakat

Perilaku kewarganegaraan tidak terbatas pada satu bentuk, melainkan muncul dalam variasi yang berbeda, di mana masing-masing memberikan kontribusi pada perubahan sosial melalui cara yang berbeda pula. Dalton (2008) membedakan dua fokus utama dalam perilaku kewarganegaraan: kewarganegaraan yang penuh tanggung jawab, yang berorientasi pada pemenuhan tugas-tugas formal, dan kewarganegaraan yang terlibat, yang mencerminkan partisipasi aktif dalam isu-isu masyarakat. Kedua fokus ini tidak berada dalam urutan tingkat tertentu, tetapi saling melengkapi dalam mendorong transformasi sosial di berbagai tingkatan, mulai dari perubahan pada kebijakan institusi hingga perubahan nilai dan norma budaya yang lebih fundamental.

Perilaku kewarganegaraan tidak terbatas pada satu bentuk, melainkan muncul dalam variasi yang berbeda, di mana masing-masing memberikan kontribusi pada perubahan sosial melalui cara yang berbeda pula. Dalton (2008) membedakan dua fokus utama dalam perilaku kewarganegaraan: kewarganegaraan yang penuh tanggung jawab, yang berorientasi pada pemenuhan tugas-tugas formal, dan kewarganegaraan yang terlibat, yang mencerminkan partisipasi aktif dalam isu-isu masyarakat. Kedua fokus ini tidak berada dalam urutan tingkat tertentu, tetapi saling melengkapi dalam mendorong transformasi sosial di berbagai tingkatan, mulai dari perubahan pada kebijakan institusi hingga perubahan nilai dan norma budaya yang lebih fundamental.

Pattie, Seyd, dan Whiteley (2004) mengelompokkan perilaku kewarganegaraan ke dalam tiga kategori berdasarkan skala: partisipasi di tingkat mikro yang bersifat individu, partisipasi di tingkat meso melalui organisasi komunitas, dan partisipasi di tingkat makro yang berfokus pada perubahan kebijakan sistemik. Ketiga tingkat ini berfungsi secara bersamaan dan saling mendukung dalam menciptakan dinamika perubahan sosial. Berdasarkan kerangka ini, studi ini mengidentifikasi empat bentuk perilaku kewarganegaraan yang secara empiris terbukti berperan penting dalam perubahan sosial masyarakat. Pattie, Seyd, dan Whiteley (2004) mengelompokkan perilaku kewarganegaraan ke dalam tiga kategori berdasarkan skala: partisipasi di tingkat mikro yang bersifat individu, partisipasi di tingkat meso melalui organisasi komunitas, dan partisipasi di tingkat makro yang berfokus pada perubahan kebijakan sistemik. Ketiga tingkat ini berfungsi secara bersamaan dan saling mendukung dalam menciptakan dinamika perubahan sosial. Berdasarkan kerangka ini, studi ini mengidentifikasi empat bentuk perilaku kewarganegaraan yang secara empiris terbukti berperan penting dalam perubahan sosial masyarakat.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah jenis perilaku kewarganegaraan yang paling jelas hubungannya dengan perubahan sosial dalam konteks demokrasi. Verba, Schlozman, dan Brady (1995) mendeskripsikan partisipasi politik sebagai rentang tindakan yang mencakup pemungutan suara, kampanye, interaksi langsung dengan pejabat publik, serta keterlibatan dalam protes dan demonstrasi. Setiap bentuk partisipasi ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam mentransformasikan keinginan warga menjadi perubahan kebijakan nyata.

Keterlibatan dalam Masyarakat Sipil dan Organisasi Komunitas

Keterlibatan dalam masyarakat sipil termasuk partisipasi dalam organisasi non pemerintah, asosiasi sukarela, grup advokasi, dan komunitas berbasis nilai merupakan bentuk perilaku kewarganegaraan yang secara konsisten terkait dengan perubahan sosial yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Habermas (1996) dalam teori ruang publiknya berpendapat bahwa masyarakat sipil yang aktif menciptakan arena deliberasi kritis di mana opini publik berkembang, bertemu, dan disalurkan ke dalam sistem politik. Proses deliberasi inilah yang memungkinkan perubahan sosial yang normatif terjadi dengan cara yang damai dan mendapat legitimasi.

Penyebaran Hoax Berpengaruh pada Perubahan Perilaku Kewarganegaraan di Era Digital

Berdasarkan analisis literatur dari berbagai jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya, penyebaran berita palsu di zaman digital memiliki dampak besar terhadap perilaku kewarganegaraan masyarakat. Sumber-sumber yang diteliti mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi informasi dan media sosial telah mempercepat arus informasi, termasuk informasi yang salah atau menipu. Berita hoaks yang menyebar dengan cepat dapat berpengaruh pada cara masyarakat mendapatkan, memahami, dan merespons berbagai masalah publik yang berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran berita palsu memiliki dampak terhadap perilaku kewarganegaraan masyarakat. Sejumlah studi menemukan bahwa individu yang terpapar oleh berita palsu lebih cenderung untuk membangun pandangan berdasarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Situasi ini dapat berpengaruh pada kualitas keikutsertaan warga negara dalam sistem demokrasi, karena keputusan dan tindakan yang diambil sering kali berlandaskan informasi yang keliru. Sebagai akibatnya, partisipasi masyarakat dalam menangani masalah-masalah publik menjadi tidak objektif dan kurang berlandaskan fakta yang benar.

Selain itu, studi literatur menunjukkan bahwa berita hoaks dapat menyebabkan sejumlah efek sosial, seperti bertambahnya konflik, polarisasi, dan menurunnya toleransi di antara anggota komunitas. Informasi yang tidak benar dan mengandung unsur provokasi sering kali menimbulkan perdebatan serta kebingungan baik di dunia maya maupun di kehidupan sehari-hari. Beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa hoaks dapat memperkuat pandangan negatif terhadap kelompok tertentu, sehingga bisa mengancam persatuan dan keterikatan sosial yang merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa.

Selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara tingkat literasi digital dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi hoaks. Orang-orang yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik serta keterampilan berpikir kritis cenderung dapat memeriksa kebenaran informasi sebelum menerima atau menyebarkannya. Di sisi lain, rendahnya literasi digital membuat masyarakat lebih rentan terhadap kerja hoaks. Oleh karena itu, berbagai sumber literatur menekankan pentingnya penguatan literasi digital serta pendidikan kewarganegaraan sebagai langkah untuk menciptakan warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu berperan dengan baik di dunia digital.

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat dikatakan bahwa penyebaran berita palsu di zaman digital memiliki dampak yang besar terhadap tingkah laku kewarganegaraan masyarakat. Dampak ini terlihat dari pergantian cara masyarakat dalam mendapatkan informasi, membentuk pandangan, berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan politik, serta berinteraksi dengan warga lainnya. Situasi ini timbul karena kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari proses globalisasi telah menghasilkan aliran informasi yang sangat cepat dan tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu. Masyarakat kini dapat menjangkau berbagai informasi dari seluruh dunia hanya dengan menggunakan perangkat digital yang mereka miliki. Namun, derasnya informasi ini tidak selalu disertai kemampuan masyarakat untuk menyaring dan memverifikasi kebenaran informasi yang diterima.

Dampak Fenomena Masyarakat Urban terhadap Perilaku Kewarganegaraan di Era Digital

Perkembangan masyarakat urban merupakan salah satu konsekuensi dari proses modernisasi dan urbanisasi yang berlangsung secara masif di berbagai wilayah. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan tidak hanya mengubah struktur demografis, tetapi juga memengaruhi pola interaksi sosial, cara berpikir, serta bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kewarganegaraan, masyarakat urban menghadirkan dinamika yang kompleks karena kehidupan perkotaan ditandai oleh keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan.

Di satu sisi, lingkungan perkotaan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudahan akses terhadap informasi, pendidikan, dan teknologi memungkinkan masyarakat urban lebih memahami berbagai isu publik, mulai dari kebijakan pemerintah, persoalan lingkungan, hingga isu-isu sosial yang berkembang di tingkat lokal maupun global. Kondisi ini dapat meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan demokrasi, seperti mengikuti diskusi publik, menyampaikan aspirasi melalui media digital, maupun terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pendidikan.

Namun, kehidupan urban juga membawa tantangan bagi perilaku kewarganegaraan. Tingginya tingkat mobilitas dan kesibukan masyarakat perkotaan sering kali menyebabkan berkurangnya interaksi sosial antarwarga. Hubungan sosial yang cenderung bersifat individualistik dapat melemahkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial yang menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih berfokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan Bersama

Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat urban turut memengaruhi cara warga menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Media sosial memberikan ruang yang luas untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam berbagai isu publik. Akan tetapi, penggunaan teknologi yang tidak disertai literasi digital yang memadai berpotensi menimbulkan penyebaran informasi yang tidak akurat, polarisasi pendapat, serta konflik sosial di ruang digital.

Hubungan Perubahan Sosial Masyarakat Modern terhadap Perilaku Kewarganegaraan

Perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi memiliki hubungan yang erat dengan perilaku kewarganegaraan masyarakat. Modernisasi mendorong perubahan nilai, pola pikir, dan struktur sosial dari yang bersifat tradisional menuju pola yang lebih rasional, terbuka, dan berorientasi pada pencapaian. Menurut Parsons (1951), modernisasi tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan sistem nilai dan peran sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya, seperti partisipasi dalam kegiatan sosial, kepatuhan terhadap aturan hukum, serta keterlibatan dalam proses demokrasi. Dengan demikian, semakin berkembang proses modernisasi, semakin besar pula peluang terbentuknya perilaku kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari perubahan sosial modern turut memengaruhi perilaku kewarganegaraan masyarakat. Lerner (1958) menjelaskan bahwa media dan teknologi berperan sebagai agen modernisasi yang mampu memperluas wawasan masyarakat dan mendorong keterlibatan mereka dalam kehidupan publik. Kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pengetahuan mengenai demokrasi, hak asasi manusia, kebijakan publik, serta berbagai persoalan kebangsaan. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih kritis, responsif, dan aktif dalam menyampaikan aspirasi maupun mengawasi kebijakan pemerintah melalui berbagai platform digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan sosial modern telah memperluas bentuk partisipasi kewarganegaraan dari ruang fisik menuju ruang digital.

Namun demikian, perubahan sosial modern juga menghadirkan tantangan terhadap perilaku kewarganegaraan. Menurut Girsang dan Telaumbanua (2024), meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital dapat menyebabkan melemahnya praktik sosial konvensional seperti gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Durkheim yang menyatakan bahwa melemahnya solidaritas sosial dapat mengurangi keterikatan individu terhadap nilai-nilai kolektif dalam masyarakat. Di sisi lain, Zain (2026) menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat digital turut mendorong munculnya sikap individualisme yang berpotensi mengurangi partisipasi sosial warga apabila tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan literasi digital yang kuat agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan tanggung jawab sosial dan komitmennya sebagai warga negara.

Tingkat Literasi Media Sosial terhadap Perubahan Sosial dalam Perilaku Kewarganegaraan

Tingkat literasi media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sosial dalam perilaku kewarganegaraan masyarakat. Literasi media sosial tidak hanya mencakup kemampuan mengakses informasi, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dalam perspektif modernisasi, Lerner (1958) menjelaskan bahwa perkembangan media dan teknologi informasi menjadi faktor penting yang mendorong perubahan pola pikir masyarakat menuju pola yang lebih terbuka dan partisipatif. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi media sosial yang tinggi cenderung lebih mampu memahami isu-isu publik, mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kewarganegaraan secara aktif. Dengan demikian, literasi media sosial berperan dalam membentuk warga negara yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya di tengah perkembangan masyarakat digital.

Selain meningkatkan akses terhadap informasi, literasi media sosial juga berkontribusi dalam membentuk perilaku kewarganegaraan yang kritis dan demokratis. Menurut Blumer, melalui interaksionisme simbolik, individu membangun pemahaman dan makna sosial melalui proses komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Dalam era digital, media sosial menjadi ruang interaksi baru yang memungkinkan masyarakat bertukar informasi, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam diskusi mengenai berbagai persoalan sosial dan politik. Individu yang memiliki kemampuan literasi media sosial yang baik akan lebih mampu menyaring informasi, menghindari penyebaran hoaks, serta menggunakan media sosial sebagai sarana partisipasi sosial yang konstruktif.

Sebaliknya, rendahnya literasi media sosial dapat menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh informasi yang tidak valid sehingga berpotensi memengaruhi kualitas partisipasi kewarganegaraan. Namun demikian, tingginya penggunaan media sosial tidak selalu diikuti oleh tingginya tingkat literasi media sosial. Lerner (1958) menjelaskan bahwa media dan teknologi dapat menjadi sarana perubahan sosial yang positif apabila masyarakat mampu memanfaatkan informasi secara bijaksana. Tanpa kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang memadai, penggunaan media sosial justru dapat mendorong perilaku konsumtif, individualistis, serta menurunkan kualitas interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, tingkat literasi media sosial menjadi faktor penting yang menentukan apakah perubahan sosial yang terjadi akan menghasilkan perilaku kewarganegaraan yang lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab atau justru sebaliknya. Penguatan literasi media sosial melalui pendidikan dan pembelajaran kewarganegaraan diperlukan agar masyarakat mampu memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk memperkuat partisipasi sosial dan kehidupan demokratis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa perubahan sosial dan modernisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat pada era globalisasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, hingga menjalankan perannya sebagai warga negara. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya pola pikir yang lebih terbuka, kritis, dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku kewarganegaraan masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi warga dalam berbagai aktivitas sosial, politik, maupun ruang publik digital. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi lokal juga menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya masih memiliki posisi penting sebagai landasan dalam menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat. Namun, perkembangan modernisasi tidak hanya membawa dampak positif. Meningkatnya penggunaan teknologi digital turut memunculkan berbagai tantangan, seperti kecenderungan perilaku individualistis, berkurangnya intensitas interaksi sosial secara langsung, serta maraknya penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang memadai. Oleh karena itu, literasi digital dan literasi media sosial menjadi faktor yang sangat penting dalam membentuk perilaku kewarganegaraan yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kemampuan masyarakat dalam memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara tepat akan menentukan bagaimana mereka merespons berbagai perubahan sosial yang terjadi. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan kemajuan teknologi, penguatan pendidikan kewarganegaraan, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal perlu terus dijaga agar modernisasi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pendidikan formal maupun nonformal agar masyarakat lebih mampu menyaring, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bijak serta terhindar dari penyebaran hoaks dan disinformasi, 2) Memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap kritis, tanggung jawab sosial, dan kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara di era digital, 3) Mendorong pelestarian nilai-nilai budaya lokal, seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, dan solidaritas sosial, agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat meskipun berada di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin pesat, 4) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan dengan metode survei, wawancara, atau studi kasus agar diperoleh data empiris yang lebih mendalam mengenai pengaruh perubahan sosial dan modernisasi terhadap perilaku kewarganegaraan masyarakat pada berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan artikel ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi selama proses penyusunan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Wika Hardika Legiani, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat berharga dalam penyusunan artikel ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh teman-teman Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta rekan-rekan kelompok yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, E. M., Rahmayanti, A., Amri, A., & Qohar, A. (2026). Merawat tradisi merespon transformasi: Dinamika pengembangan masyarakat Islam berbasis kearifan lokal di era modernisasi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(5).
- Aslan, & Pugu, M. R. (2025). Pergeseran makna religius: Pengaruh interaksi budaya global terhadap tradisi lokal. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), 158–168.
- Basri, A., dkk. (2024). Pembangunan dan identitas sosial: Kajian literatur tentang interaksi antara modernisasi dan pelestarian tradisi dalam masyarakat lokal. *Jurnal Pengabdian dan Sosial*.
- Chadijah, D., & Sariyanti, L. (2023). Lato-lato: Sebuah fenomena perubahan sosial ditinjau dari teori siklus. *Society*, 3(1).
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi prinsip demokrasi dalam hukum tata negara: Tinjauan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295–302.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fitriani, D., Budiyan, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia: Analisis peran teknologi dan media sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 362–371.
- Hasbullah, A., Ahid, N., & Sutrisno. (2022). Penerapan teori interaksi simbolik dan perubahan sosial di era digital. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 10(1).
- Hidayat, A. (2023). Komunitas lokal dan masyarakat sipil di Indonesia: Antara solidaritas dan tantangan globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2), 101–115.
- Hidayat, A., & Zulfikar, M. (2024). Peran simulasi pemilu inklusif dalam meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 10(1), 21–37. <https://doi.org/10.31764/jpki.v10i1.3456>
- Iryani, J., & Syam, N. (2023). Peran media sosial dalam menyebarkan pesan agama dan perubahan sosial. *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, 11(2).
- Jatnika, D. C., Humaedi, S., & Firsanty, F. P. (2024). Program pemerintah dan dinamika partisipasi masyarakat untuk optimalisasi keberfungsian sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 237–249. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60625>
- Judijanto, L., Damanik, F. H. S., Kusnadi, I. H., Ahmadun, A., & Leuwol, N. V. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik: Menilai efektivitas model keterlibatan warga. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1779–1787.

- Jumaidiyah, J. (2026). Transformasi nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat modern sebagai dampak globalisasi dan perubahan sosial. *Journal of Islamic Social and Cultural Studies*, 1(1), 1–15.
- Kurniawati, L., & Darmawan, R. (2023). Penguatan kontrol sosial masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah melalui forum warga. *Jurnal Demokrasi dan Partisipasi*, 8(1), 55–70.
- Maunah, B., & Anjani, S. (2022). Perubahan sosial serta upaya menjaga kesinambungan masyarakat. *Jurnal Pendidikan IPS*, 12(2).
- Miharja, D. (2023). Religious life of the Kuta traditional village community in the influence modernization era.
- Mudhoffir, A. M. (2023). The limits of civil society activism in Indonesia: The case of the weakening of the KPK. *Critical Asian Studies*, 55(1), 62–82. <https://doi.org/10.1080/14672715.2022.2123019>
- Muhammad, A. (2017). Interaksi dan perubahan sosial masyarakat Baduy di era modern. *Spatial: Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*.
- Nasution, A., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh media sosial terhadap partisipasi kewarganegaraan generasi muda di era digital. *Jurnal Civic Education*.
- Nugraha, F. (2022). Gerakan komunitas lokal sebagai basis demokrasi akar rumput. *Jurnal Politik Lokal*, 10(2), 77–93.
- Nugroho, H. (2021). Gerakan masyarakat sipil dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(2), 89–104.
- Nurhayati, M. A., Wirayudha, A. P., Fahrezi, A., Pasama, D. R., & Noor, A. M. (2023). Pengaruh aktivis mahasiswa dalam perubahan sosial politik di Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(3), 215–230. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.3490>
- Panamuan, R., dkk. (2024). Dampak globalisasi terhadap kebudayaan lokal pada era modernisasi. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Indonesia*.
- Pratama, A., & Pratama, R. (2024). Perubahan identitas budaya masyarakat urban di era modern. *Perseptif*.
- Pratama, R., & Hidayat, M. (2023). Urbanisasi dan perubahan perilaku sosial masyarakat perkotaan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Nusantara*.
- Putra, P., Salsabila, M., Fadia, M., & Aisy, M. (2025). Perubahan nilai dan norma pada masyarakat: Studi sosial di era globalisasi. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 219–220.
- Rahmawati, N., & Putri, E. A. (2021). Interaksi sosial masyarakat urban dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Rivaldi, R., & Yulifar, L. (2025). Tradition and modernity: An ethnographic study of the adaptation of the Ciptagelar traditional village.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: Memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The role of civil society organizations in promoting social and political change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(3), 187–206. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2154>

- Sahid, F. N. (2022). Membangun organisasi masyarakat sipil yang sehat dan akuntabel. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 3(1), 1–18.
- Sakban, A., Budimansyah, D., Darmawan, C., & Syaifullah. (2025). The importance of citizenship responsibility for the young generation in the conservative anti-corruption movement. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2), 278–293. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.85564>
- Sari, N. D., & Pramono, E. (2022). Literasi hukum dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan publik di tingkat lokal. *Jurnal Civic Education*, 6(1), 33–47.
- Setiawan, B., & Kurniawan, F. (2024). Literasi digital dan pembentukan karakter kewarganegaraan pada masyarakat perkotaan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Setiawan, K. M. P., & Tomsa, D. (2023). Defending a vulnerable yet resilient democracy: Civil society activism in Jokowi's Indonesia. *Politics & Policy*, 51(6), 1050–1074. <https://doi.org/10.1111/polp.12553>
- Sutrisno, E. (2022). *Sosiologi perkotaan: Dinamika masyarakat urban di era modern*. Rajawali Pers.
- Umar, M., dkk. (2025). Eksistensi tradisi Baronde sebagai kearifan lokal di era modernisasi. *Journal of Education, Community, and Culture (JECCO)*.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- United Nations. (2022). *World urbanization prospects 2022: Summary of results*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2023). Youth political participation and digital movement in Indonesia: The case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, 12, 122669. <https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3>
- Wibowo, A., & Lestari, S. (2024). Peran interaksi sosial dalam membangun kohesi sosial pada masyarakat multikultural. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*.
- World Bank. (2023). *World development report 2023: Migrants, refugees, and societies*. World Bank.
- Yadisar, A. M. (2024). Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal FISIP Universitas Kapuas Sintang*, 22(2), 1–15.
- Yasin, M., Zahrah, F., & Hapsah, R. (2024). Dinamika interaksi manusia, masyarakat, dan budaya dalam era globalisasi dan modernisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (SINOVA)*, 2(2), 191–202.
- Yusuf, M., & Handayani, R. (2025). Kewarganegaraan digital dan partisipasi masyarakat dalam ruang publik modern. *Jurnal Pendidikan Sosial*.
- Yusuf, S., dkk. (2021). Modernisasi terhadap perubahan sosial masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 84–96.